

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA  
PERIODE 1990-2013**

**THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)  
ON INDONESIA ECONOMIC GROWTH 1990-2013**

**Ari Mulianta Ginting\*)**

Naskah diterima 16 September 2014, direvisi 1 Oktober 2014,  
disetujui 20 Oktober 2014

**Abstract**

*Economic growth is a necessary condition for development and better public welfare. According to the economic theory, economic growth is influenced by various factor, such as government expenditure and FDI. This research applying qualitative and quantitative methods to know economic growth development and the influence of government expenditure and FDI to economic growth. Research findings, qualitatively, reveals that the economic growth development can be grouped in to 3 phase, namely "new order regime" phase, "crisis and recovery" phase, and "SBY-nomics" phase. Meanwhile, the quantitative analysis indicates that government expenditure has positive and significant impact on economic growth, so it is the right time for government to increase the government expenditure to public sector rather than other spendings. Simultaneously, FDI variabel has positive and significant influence on economic growth, the government, therefore, should make a policy which can stimulate the increase of FDI into Indonesia.*

**Keywords:** *Government Expenditure, Foreign Direct Investment, FDI, Economic Growth, Indonesia*

**Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase "krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke Indonesia.

**Kata kunci:** *Pengeluaran Pemerintah, Foreign Direct Investment, FDI, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke-4 telah menuliskan tujuan didirikannya negara ini. Salah satunya

tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan pengertian ini maka sudah jelas tujuan kehidupan bernegara dan berbangsa yaitu terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Untuk mencapai dan mewujudkannya diperlukan suatu proses pembangunan secara berkesinambungan. Salah satu bidang yang penting dalam pembangunan adalah bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat hasil perkembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan adanya peningkatan perekonomian suatu negara dan jika pertumbuhan ekonomi negatif maka menunjukkan penurunan perekonomian negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin mudah bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat, peningkatan pendapatan masyarakat tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dibutuhkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkesinambungan.

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, maka perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlangsung bahkan pada saat krisis membayangi dunia pada tahun 2008. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan situasi yang kurang baik bagi perekonomian dunia, krisis zona Euro masih menekan pertumbuhan ekonomi global. Bahkan Oliver Blanchard, kepala ekonom IMF mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi justru dipimpin oleh negara-negara maju. Laporan IMF mengatakan bahwa secara keseluruhan, *output* ekonomi diperkirakan lamban di negara maju. Salah satu keprihatinan utama dikalangan pembuat kebijakan di

seluruh dunia telah menjadi krisis utang yang sedang berlangsung di zona Euro dan dampaknya terhadap pertumbuhan global.<sup>1</sup> Demikian pula ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia pada tahun 1997-1998. Pada saat tersebut hampir semua negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi, tak terkecuali Indonesia. Dampak terparah adalah ketika pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 mencapai negatif 13,13%. Akan tetapi perlahan tetapi pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur mengalami pemulihan.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami tren meningkat dari tahun ke tahun dan cukup tangguh menghadapi krisis tidak lepas dari faktor-faktor yang menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana, dan sarana), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*), baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduk, kemajuan teknologi, akses terhadap investasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional. Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari berbagai variabel di dalamnya adalah pengeluaran pemerintah dan investasi.<sup>3</sup>

Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu variabel penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. *John Due (1968)* dalam Fajar Wardhani mengatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nyata dengan perubahan

<sup>1</sup> "Menyambut Tahun Ketidakpastian", *Republika*, 23 Oktober 2012.

<sup>2</sup> Michael P. Todaro, *Economic Development 8<sup>th</sup> edition, England: Pearson Education*, 2008, p. 37.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012 hlm.169, hlm. 421-423.

berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran misalnya pendidikan.<sup>4</sup> Distribusi barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh adalah hasil dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang sehingga menjadi tenaga yang berprestasi relatif lebih baik dan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Demikian pula subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah agar dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Adapun pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun oleh mekanisme pasar. Misalnya penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif maupun barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah.

Pada saat bersamaan, selain pengeluaran pemerintah diperlukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, investasi juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan sumber daya penting untuk meningkatkan modal atau stok kapital, karena stok kapital yang tersedia di suatu negara atau daerah akan menentukan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Investasi memiliki peranan ganda dalam meningkatkan pendapatan. Fungsi pertama adalah investasi dapat mendorong perekonomian melalui sisi permintaan. Fungsi kedua bahwa pengeluaran investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, sehingga akan mendorong meningkatkan permintaan produksi. Dengan meningkatnya produksi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Melalui peningkatan

pendapatan para pekerja maka akan meningkatkan pula pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi diharapkan juga meningkatkan peran serta masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha guna memperkuat sumber dana bagi pembiayaan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga terjadi pemerataan pembangunan.<sup>5</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam statistik penanaman modal membagi penanaman modal menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).<sup>6</sup>

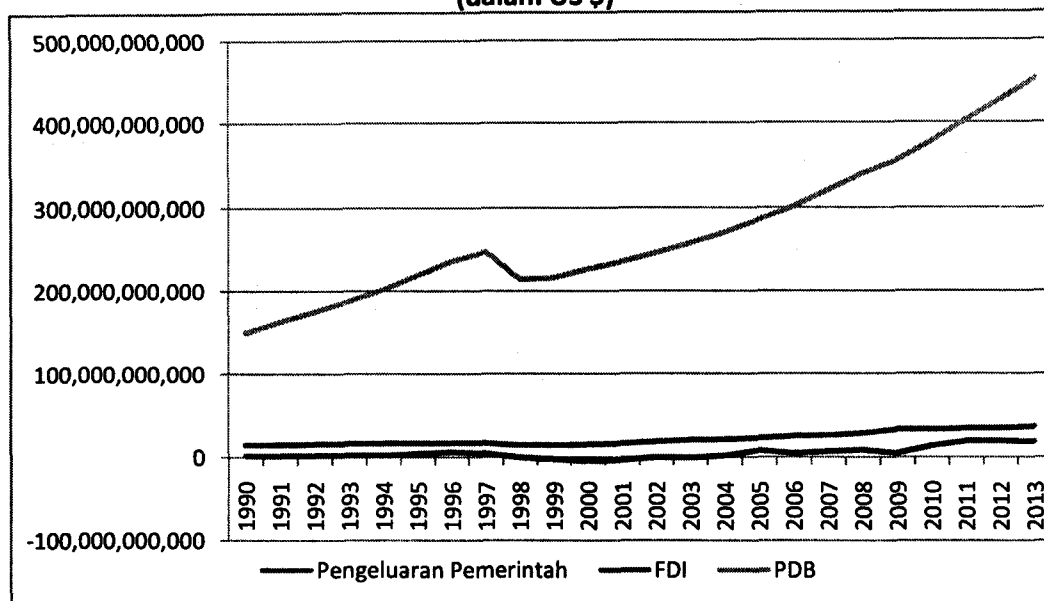
Jika melihat perkembangan pengeluaran pemerintah dan perkembangan PDB dan FDI yang masuk ke Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mengalami tren yang positif dan meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 1. menunjukkan dari tahun 1990 besarnya pengeluaran pemerintah adalah sebesar US\$14,5 juta, meningkat 155,75% pada tahun 2013 menjadi US\$37,09 juta. Peningkatan pengeluaran pemerintah berdasarkan Gambar.1 memiliki tren yang positif senada terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga memiliki tren positif. Secara analisa grafik membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB. Akan tetapi diperlukan analisa kuantitatif dengan menggunakan regresi untuk membuktikan hal tersebut.

<sup>4</sup>Fajar Wardhany, *Pengaruh Faktor Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batang*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang, 2011, hlm. 11.

<sup>5</sup>Dedi Latip, *Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Tahun 2000-2006*. Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. 2009, hlm.14

<sup>6</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA*, 2014, hlm. 3-4

**Gambar 1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, PDB dan FDI (dalam US \$)**



Sumber: World Bank (2014).

Senada dengan pengeluaran pemerintah, FDI berdasarkan Gambar 1. memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PDB. Perkembangan FDI yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990 hingga tahun 2013 memiliki tren yang positif dan meningkat hampir setiap tahun, kecuali pada krisis yang terjadi melanda Amerika dan Eropa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Pada kurun waktu tersebut investasi yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun berikutnya kembali meningkat. Secara analisa grafik cukup menjelaskan bahwa FDI memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dibutuhkan analisa kuantitatif untuk membuktikan hal tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, maka secara garis besar tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi periode tahun 1990 sampai dengan 2013, sehingga berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari periode Orde Baru sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, yang ditekankan pada tiga aspek yaitu proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu waktu yang

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>7</sup>

Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi diukur dalam nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB inilah yang menjadi indikator ukuran dari tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup> Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini pengukuran berdasarkan jenis pengeluaran dari berbagai sektor yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi dan net ekspor.<sup>10</sup>

## 2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat *output*, serta kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

## 3. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Hukum Wagner yang dikutip oleh Fajar (2011) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara peningkatan *output* dari suatu negara dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Lebih lanjut Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*). Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.<sup>12</sup> Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran pemerintah. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran agregat maupun penentu pertumbuhan GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian atas barang dan jasa yang

<sup>7</sup>Sri Endang Rahayu, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 11 No.2, 2011, hlm.130.

<sup>8</sup>Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, *Data Strategis Indonesia 2012*, hlm.20.

<sup>10</sup>Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 21-22.

<sup>11</sup>Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>12</sup>Fajar, *op.cit.*, hlm. 11-12.

akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru, PNS, membeli alat-alat tulis, kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi.<sup>13</sup>

Sodik (2007) melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap 26 provinsi di Indonesia dengan data periode tahun 1993 sampai dengan 2003. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, baik yang berasal dari investasi pemerintah maupun konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>14</sup> Senada dengan penelitian sebelumnya, Rahayu (2011) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data di Provinsi Sumatera Utara, Rahayu menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.<sup>15</sup>

#### 4. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (Investasi Asing) adalah investasi yang dibuat untuk mendapatkan suatu kepentingan yang berkelanjutan dalam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh investor dengan tujuan mengefektifkan kegiatan manajemen perusahaan. Investasi Asing adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Dengan adanya Investasi Asing yang masuk ke dalam perekonomian berarti perekonomian tersebut menerima tambahan modal untuk memperbaiki teknologi dan

menghasilkan *output* yang pada akhirnya akan diperhitungkan ke dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti Investasi Asing memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Penanaman modal asing yang sering disebut sebagai investasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para pengusaha luar negeri dinamakan dengan investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*). Investasi asing langsung (*foreign direct investment*) diambil setelah ada jaminan bahwa investasi itu aman dari resiko dan persaingan mitra lokal dan menguntungkan karena pasar telah berkembang dan memberikan respons yang positif. Contohnya perusahaan Astra mengembangkan program terpadu hingga ke desa-desa diseluruh Indonesia dengan tujuan mengamankan investasi yang telah ditanamkan agar pelayanan dalam bidang penjualan dan ketersediaan suku cadang seperti *spare part* dapat dipenuhi. Pemilikan modal saham oleh investor penduduk luar negeri. Investasi langsung berkepentingan untuk mengendalikan manajemen suatu perusahaan dan memperoleh keuntungan besar.

Yang dimaksud investasi asing langsung adalah dana-dana investasi langsung yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau membeli fasilitas produksi seperti membeli lahan, mendirikan pabrik-pabrik, membeli mesin-mesin, membeli bahan baku dan sebagainya. Istilah ini sengaja dimunculkan untuk membedakannya dari investasi portofolio dimana dana-dana investasinya tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan bisnis yakni digunakan untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

#### 5. FDI dan Pertumbuhan Ekonomi

Literatur yang membahas tentang perkembangan FDI sangat banyak. Salah satunya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai hipotesis disebutkan, FDI bukan hanya berperan dalam pemindahan teknologi pembentukan modal dan mewujudkan peluang pekerjaan, akan tetapi

<sup>13</sup>Sadono Sukirno, *op.cit.*, hlm 168-169.

<sup>14</sup>Jamzani Sodik, "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* .Vol. 12 No. 1. 2007, hlm. 33.

<sup>15</sup>Sri Endang Rahayu, *op.cit.*, hlm. 135-137.

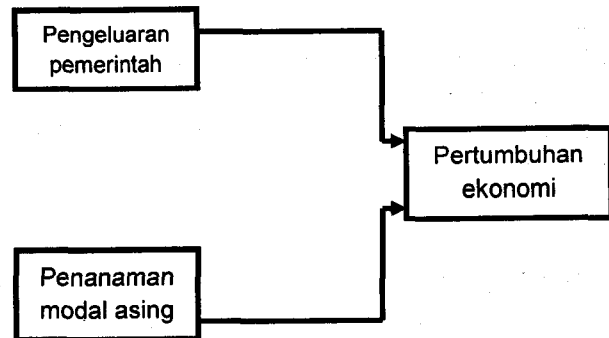
juga berperan meningkatkan pendapatan negara penerima FDI dan selanjutnya akan membawa pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Studi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah FDI. Peningkatan FDI suatu negara ternyata tidak hanya berperan dalam pemindahan teknologi, pembentukan modal, dan mewujudkan peluang pekerjaan, akan tetapi juga berperan meningkatkan pendapatan negara penerima FDI dan selanjutnya akan membawa pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan Shakrani, et.al. (2003), memberikan kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara adalah tingkat pertumbuhan negara tersebut. Dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan FDI. Artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan semakin baik (tinggi) pula aliran FDI ke negara tersebut.<sup>16</sup> Senada dengan penelitian diatas, Ilham (2007) menemukan bahwa berdasarkan studi empirik FDI memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Studi yang dilakukan oleh Falak, et.al. (2012) menggunakan data dari negara-negara seperti India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2010 menemukan hasil yang mendukung penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metode *Generalized Method of Moment* (GMM) menemukan salah satunya adalah FDI memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan *output* dari sejumlah negara tersebut. Peningkatan *output* dari suatu negara pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adalah objek penelitian menggunakan data Indonesia dengan periode penelitian yang dimulai dari pemerintahan Presiden Soeharto sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian



Dari gambar kerangka konsep penelitian yang disusun oleh penulis, terlihat jelas bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan investasi asing langsung, dimana baik belanja pemerintah maupun investasi asing langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kerangka pikir konseptual akan dibahas lebih mendalam pada bagian berikutnya.

### E. Metodologi Penelitian

Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 1990 hingga 2013. Dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Zhaoyong Zhang (2002), diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang diharapkan seperti tertuang pada bab sebelumnya.<sup>19</sup> Metodologi yang digunakan dalam analisis adalah model ekonometri berupa data runtut waktu (*time series*) yang selanjutnya akan dibahas pada penelitian

<sup>16</sup>Saharudin Shakrani, Rizaudin Sahlan, Zairy Zainol, "Pertumbuhan Pacuan Pelaburan Langsung Asing: Ujian Sebab-Menyebab di Malaysia", *Jurnal Ekonomi Malaysia* Vol. 37. No. 4, 2003, hlm. 96-98.

<sup>17</sup>Ilham Ozturk, "Foreign Direct Investment- Growth Nexus: A Review of Recent Literature", *International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies*, Vol. 4 No. 2, 2007, p. 91-92.

<sup>18</sup>Falak Sher, Khalid Javed, "Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth : A Comparison of Selected South Asian Countries", *International Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 2 No. 5, 2012, p. 217-218.

<sup>19</sup>Zhaoyong Zhang. (2002). *Productivity and Economic Growth: An Empirical Assessment of The Contribution of FDI to Chinese Economy*. *Journal of Economic Development*. Vol.27 No.2, p. 90-93.

ini. Bagian ini juga akan membahas mengenai data yang digunakan, konsep-konsep, indikator serta kelemahan dari data. Disamping itu dibahas pula mengenai teknik pendugaan dan pengujian parameter yang digunakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDB_{xt} = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 PMA_t + \varepsilon_t$$

dimana:

PDB : Pertumbuhan Ekonomi

G : pengeluaran pemerintah

PMA : investasi asing (Penanaman Modal Asing)

$\varepsilon$  : residual

### 1. Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional untuk variabel yang digunakan dalam meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

#### Variabel Terikat

##### *Tingkat Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan domestik bruto dari tahun sekarang dibandingkan pendapatan domestik bruto tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diprediksi dengan pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan Domestik Bruto merupakan keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Dalam penelitian ini data PDB adalah PDB konstan dengan berdasarkan tahun dasar 2005 yang mencerminkan PDB sesungguhnya yang dihasilkan oleh perekonomian suatu wilayah setelah dieliminasi dari pengaruh harga. Data PDB dalam satuan US\$ dan diperoleh dari World Bank.

#### Variabel Bebas

##### *Pengeluaran Pemerintah*

Pengeluaran pemerintah adalah nilai riil dari jumlah total realisasi pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran, termasuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sesuai dengan APBN. Pada penelitian ini, data pengeluaran pemerintahan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan bersumber dari Nota Keuangan dan APBN.

##### *Investasi Asing (Penanaman Modal Asing)*

Untuk data investasi asing, digunakan pendekatan dengan menggunakan data Investasi asing bersih (*Net Foreign Asset*), meliputi berbagai aspek penanaman modal asing baik penanaman modal asing langsung maupun tidak langsung. Data FDI pada penelitian ini bersumber dari World Bank dalam satuan US\$.

### 2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi Word Bank, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan selama periode 1990 sampai dengan 2013. Data tersebut meliputi data Produk Domestik Bruto (PDB), Pengeluaran Pemerintah (G), serta Penanaman Modal Asing (PMA).

### 3. Metode Estimasi Data *Time Series*

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis data *time series*, yaitu data yang menggambarkan pergerakan peubah/variabel dari waktu ke waktu. Data dianalisis dengan pendekatan regresi *Ordinary Least Square*. Karena model terdiri dari lebih dari 2 variabel maka digunakan regresi linear jamak. Model akan memiliki sifat ideal yang sesuai dengan teorema Gauss-Markov. Menurut teorema Gauss-Markov, estimator linear yang baik memiliki sifat BLUE (*best linear unbiased estimator*).

### Uji Spesifikasi Model

Analisis regresi korelasi memerlukan dipenuhinya berbagai asumsi yang telah dipaparkan di atas agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Karena hal tersebut maka peneliti melakukan beberapa uji spesifikasi model untuk mendeteksi beberapa masalah yang sering dijumpai dalam analisis regresi dan korelasi.

### Uji Signifikansi

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu fakta sebagai fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji kesesuaian model ( $R^2$ ), uji secara serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test) untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesa nol.

### Uji Kesesuaian ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk  $R^2$  memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X secara bersama-sama. Besaran  $R^2$  dihitung dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS}$$

Besaran  $R^2$  terletak antara 0 dan 1, jika  $R^2 = 1$  berarti bahwa semua variasi dalam variabel terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika  $R^2 = 0$  berarti tidak ada variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika nilai  $R^2$  mendekati 1.

### Uji Secara Serempak (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta = 0$   
(variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat)

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta \neq 0$   
(variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat)

Sebelum melakukan uji ini perlu ditetapkan F tabel dan daerah kritis dengan mencari nilai F hitung dengan menggunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2) / q}{(1 - R_u^2) / (n - k)}$$

di mana:

$R_u^2$  = nilai R-square yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heterokedastisitas dan ada serial korelasi antar-*error term*.

$R_r^2$  = nilai R-square yang telah direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki homokedastisitas dan tidak ada serial korelasi antar-*error term*.

q = jumlah variabel yang direstriksi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel bebas + 1 (intersep)

Apabila F-hitung berada di daerah terima  $H_0$ , berarti F-Stat terbukti tidak berpengaruh. Dan apabila F-hitung berada di daerah terima  $H_1$ , maka F-stat terbukti berpengaruh.

## I. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

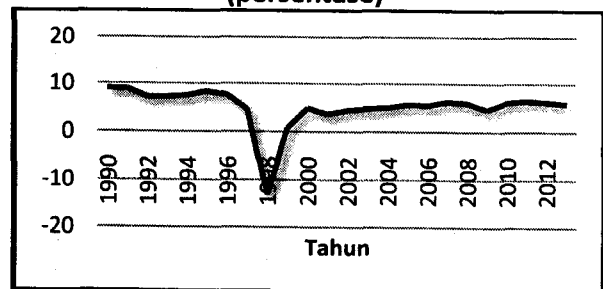
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi diukur dalam nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>20</sup> Pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun inilah yang menjadi ukuran dan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk menelaah dan mengaji lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pandangan penulis dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase atau bagian. Bagian pertama adalah pada saat Orde Baru mulai menunjukkan kejayaannya sekitar awal tahun 1990 sampai dengan sebelum krisis ekonomi terjadi. Pada fase ini pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan selalu berada diatas 7%, dan pertumbuhan ekonomi ini terus berlangsung dan kontinu hingga tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis. Oleh karena itu tidak salah jika banyak pihak mengatakan bahwa pada waktu pemerintahan Orde Baru, Indonesia merupakan salah satu "Macan Asia" karena prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu itu menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia.

Kemudian pada bagian kedua adalah bagian krisis dan pemulihan. Bagian ini merupakan masa-masa terberat yang harus dialami oleh Indonesia sebagai bangsa dan negara. Bagian ini mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Sekitar tahun 1997-1998, terjadi krisis yang melanda hampir semua

negara di Asia, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terparah terkena dampak krisis ekonomi, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami tren negatif. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menyentuh angka -13,13%. Namun perlahan tetapi pasti pertumbuhan ekonomi kembali pertumbuhan yang positif pada tahun 1999, walaupun hanya mencapai angka 0,79%. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2003 mengalami tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 mencapai 4,78%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia setelah mengalai krisis ekonomi secara perlahan menunjukkan adanya pemulihan dari krisis.

**Gambar 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1990-2013 (persentase)**



Sumber : BPS (2014).

Sementara itu bagian ketiga adalah fase SBY-*nomics*. Bagian ini ditandai dengan dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 hingga tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada fase SBY-*nomics* mengalami tren pertumbuhan yang positif dan kontinu. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencapai 5,03%, terus mengalami peningkatan dan memiliki tren yang positif hingga posisi pada akhir 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,79%. Memang pertumbuhan ekonomi belum dapat kembali ke posisi pemerintahan Orde Baru, tetapi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menggembirakan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan yang positif dan stabil di Asia. Bahkan pada saat

<sup>20</sup>BadanPusatStatistik, *Data Strategis BPS*, 2012, hlm.20-22.

negara-negara lain mengalami krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2008-2009, dan mengalami pertumbuhan yang negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 4,63%. Walaupun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tersebut mengalami penurunan akibat dampak dari krisis global yang melanda, namun perekonomian Indonesia masih dapat bertahan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS pada Tabel 1. pertumbuhan ekonomi jika ditinjau dari sisi pengeluaran maka pada tahun 2013 Komponen Pengeluaran Rumah Tangga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 54,8% bersumber dari pertumbuhan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga. Sementara itu pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi 7,8% dari total pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi yang berasal dari pemerintah masih menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan total kontribusi sumber pertumbuhan sebesar 62,6%. Sementara itu jenis pengeluaran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan kontribusi 24,9% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Jenis Pengeluaran (persentase)**

Jenis Pengeluaran		Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,8
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,8
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,9
4.	Perubahan Inventori	1,9
5.	Net Ekspor Barang dan Jasa	8,7
Total		100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014).

## B. Analisa Kuantitatif

Pada bagian berikutnya akan dipaparkan pembahasan yang merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* Eviews 6.0. Pada tahap awal dilakukan penentuan model estimasi yang sesuai dengan data yang digunakan. Adapun data yang digunakan adalah data PDB, pengeluaran pemerintah, dan investasi asing selama periode 1990 sampai dengan 2013. Dari serangkaian pengujian mengenai spesifikasi model, diperoleh kesimpulan bahwa bentuk umum persamaan dari model estimasi terbaik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &PDB = 2,2976 + 0,4679*G + 0,05173*FDI \\
 &T \quad (1,851966) \quad (3,5183) \\
 &\quad (1,92330) \\
 &Prob\ t \quad 0.0815 \quad 0.0000 \\
 &\quad 0.00029 \\
 &F = 1881.565 \quad prob\ F \quad 0.000000 \\
 &R^2 = 0.995503
 \end{aligned}$$

dimana:

PDB : produk domestik bruto=pertumbuhan ekonomi

G : belanja pemerintah

FDI : penanaman modal asing

### Hasil uji t

Dari hasil pengujian didapatkan nilai t statistik untuk masing-masing: koefisien konstanta (sebesar 2,2976), koefisien G (sebesar 0,4679) dan koefisien FDI (sebesar 0,05173). Dengan probabilita masing masing sebesar 0.0815; 0.0000 dan 0.00029. Karena masing-masing nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha=5\%$ ) maka kedua variabel bebas, baik belanja pemerintah maupun penanaman modal asing masing-masing berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Melihat hasil uji t yang menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia dengan menggunakan data 1990 sampai dengan 2013 dipengaruhi secara positif oleh dua faktor, yaitu belanja pemerintah dan investasi asing. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja pemerintah dan investasi asing maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin tinggi.

#### Hasil uji F

Untuk uji serempak (uji F) didapatkan nilai F sebesar 1881.565 dengan probabilitas 0.000000. Nilai ini lebih kecil daripada 5% yang berarti bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen, yaitu belanja pemerintah dan penanaman modal asing secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi Indonesia).

Berdasarkan hasil uji F di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa secara bersama-sama antara belanja pemerintah dan investasi asing akan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi jika dikaitkan dengan hasil uji t sebelumnya maka belanja pemerintah, baik berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan investasi asing akan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu pula sebaliknya, investasi asing akan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### Hasil uji R<sup>2</sup>

Untuk nilai R<sup>2</sup> = 0.995503 yang didapatkan dari hasil pengujian memiliki arti bahwa perubahan variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia 99,6% dipengaruhi oleh perubahan dua variabel independen, yaitu belanja pemerintah dan penanaman modal asing.

#### C. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi OLS, didapatkan hasil bahwa variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah (G) yang terjadi signifikan dan positif mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada 1 periode sebelumnya sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode sekarang sebesar 0,4679%. Hasil ini memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap pertumbuhan pengeluaran pemerintah dapat memicu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shih-Ying Wu, Jenn-Hond dan Eric S. Lin (2010), dengan menggunakan data panel dari 182 negara dari tahun 1950 – 2004 yang memberikan hasil yang mendukung hukum Warner dan hipotesis yang mengatakan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam belanja ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup> Senada dengan hasil penelitian ini, Wadad Saad dan Kamel Kalakech (2009) juga melakukan penelitian terhadap pengeluaran pemerintah di Libanon. Penelitian yang dilakukan oleh Wadad dan Kamel dengan menggunakan multivariat kointegrasi analisis menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah terutama dalam hal pendidikan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan keamanan dan kesehatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Libanon.<sup>22</sup>

Menurut pendekatan Keynesian mengenai kebijakan ekonomi, peningkatan pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun bagaimana dengan kebijakan pengeluaran pemerintah Indonesia? Hasil analisa regresi memang menunjukkan bahwa stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah memang berpengaruh positif atau mendorong terjadinya

<sup>21</sup>Shing-Yin, Jenn-Hong Tang and Eric S.Lin, "The Impact of Government Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to The Level of Development?", *Journal of Policy Modeling*, Vol. 32/6, 2010, p. 110-112.

<sup>22</sup>Wadad Saad, Kamel Kalakech, "The Nature of Government Expenditure and Its Impact on Sustainable Economic Growth Middle Eastern Finance and Economics", Euro Journals Publishing, 2009, p. 23-24.

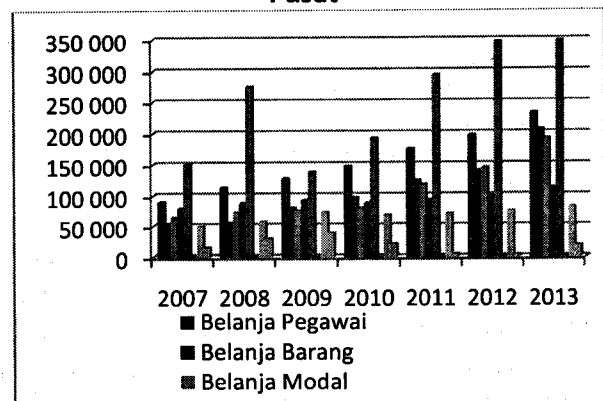
pertumbuhan ekonomi. Ekonom Universitas Atmajaya, Prasetyantoko mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah akan menjadi andalan untuk memompa permintaan domestik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup> Akan tetapi pengeluaran pemerintah harus diarahkan menjadi pengeluaran yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Akan tetapi kenyataannya pengeluaran pemerintah lebih banyak dikeluarkan untuk belanja pegawai dan subsidi, yang notabene belanja tersebut tidak langsung dinikmati oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam APBN 2013 dari Rp1.196 triliun belanja pemerintah pusat, proporsi belanja pegawai dan subsidi hampir mencapai 48,53%.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis pengeluaran besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat sendiri terdiri dari beberapa item belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, belanja hibah dan bantuan sosial serta subsidi energi dan non-energi. Dari proporsi belanja pemerintah pusat, belanja pegawai dan subsidi menjadi porsi terbesar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. Jika pada tahun 2007 belanja pegawai sejumlah Rp90.425 miliar maka pada tahun 2013 meningkat 257,64% menjadi sebesar Rp232 triliun. Sama halnya dengan pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi, pada tahun 2007 jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp150.215 miliar dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 231,74% pada tahun 2013 menjadi Rp348 triliun.

Peningkatan belanja pegawai dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah yang cukup signifikan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah, padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah belanja yang langsung dapat

dinikmati dampaknya. Menurut Mardiasmo (2002) yang diperlukan masyarakat adalah pengeluaran belanja berupa pelayanan publik berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan, karena belanja tersebut secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung oleh masyarakat (publik).

**Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat**

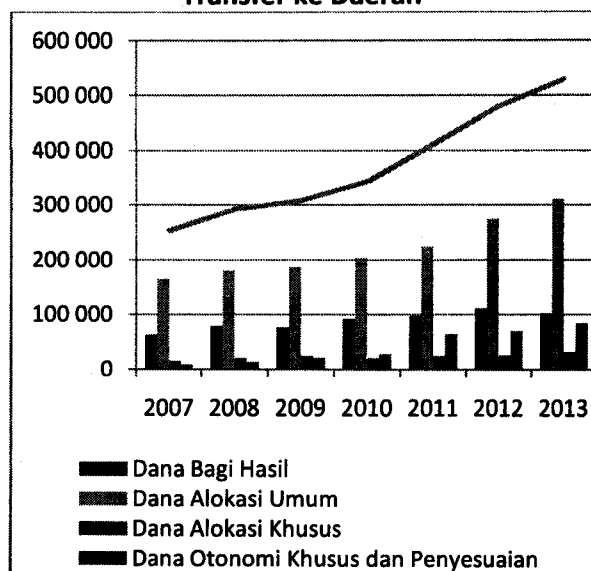


Sumber: Kementerian Keuangan (2014).

Dari sisi belanja pemerintah jenis transfer ke daerah juga memiliki tren yang hampir sama dengan pengeluaran belanja pemerintah pusat, yaitu memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Gambar 5. total dana yang ditransfer pemerintah pusat pada tahun 2007 sejumlah Rp253 triliun dan jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga hampir 209% pada tahun 2014 menjadi Rp529 triliun. Jumlah ini jika dihitung dari total proporsi pengeluaran pemerintah mencapai 30%. Dengan pengeluaran terbesar adalah komponen dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

<sup>23</sup>A. Prasetyantoko, *Ponzi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2012.

**Gambar 5. Pengeluaran Pemerintah Jenis Transfer ke Daerah**



Sumber: Kementerian Keuangan (2014).

Pengeluaran pemerintah yang sangat besar ini sudah waktunya diarahkan dan ditujukan langsung kepada pengeluaran yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas, yaitu pengeluaran pemerintah harus lebih diarahkan kepada anggaran sektor publik. Karena dalam negara demokrasi, pemerintah memiliki kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Maka sudah seharusnya pengeluaran pemerintah ditujukan kepada rakyat melalui anggaran.<sup>24</sup>

Pemerintah seharusnya memiliki komitmen untuk mengubah struktur belanja tersebut. Seharusnya anggaran belanja pemerintah harus dialokasikan kepada belanja publik daripada belanja aparatur dan subsidi. Hal ini dikarenakan jika alokasi untuk belanja publik lebih besar, maka hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Lebih lanjut mengenai pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi, penelitian yang dilakukan oleh Ari (2010) mendapatkan hasil bahwa ternyata

subsidi khususnya subsidi energi itu ternyata tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan subsidi energi dalam bentuk bahan bakar minyak selama ini lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas.<sup>25</sup> Untuk itu sudah saatnya pemerintah lebih bijak dalam melakukan belanjanya agar uang yang dibelanjakan dapat lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih terhadap perekonomian.

#### D. Pengaruh FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi OLS, didapatkan hasil bahwa variabel penanaman modal asing (FDI) yang terjadi signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan FDI 1% maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0517%, *ceteris paribus*. Hasil ini memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap pertumbuhan FDI yang masuk ke Indonesia dapat memicu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mukhlis (2012) yang menggunakan data tahun 2005 sampai dengan 2011, menemukan bahwa FDI memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia.<sup>26</sup> Lebih lanjut Dedi Latip (2009) mengemukakan bahwa berdasarkan data panel dari tahun 2000 sampai dengan 2006 terhadap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ditemukan bahwa FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>27</sup> Lebih lanjut Fabienne (2007) mengungkapkan bahwa adanya bukti empirik hubungan antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi akan tetapi terdapat variabel dependen lainnya yang

<sup>24</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Andi, 2009, hlm 69-70.

<sup>25</sup>Ari Muliarta Ginting, "Analisa Kebijakan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam Hariyadi (Ed), *Peranan Subsidi dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. SETJEN DPR RI, 2010, hlm. 20-21.

<sup>26</sup>Imam Mukhlis, "Aliran FDI dan PDB di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 4 No.2, 2012, hlm 195-198.

<sup>27</sup>Dedi Latip, *op.cit.*, hlm. 76-80.

mempengaruhi tergantung karakteristik negara yang bersangkutan.<sup>28</sup>

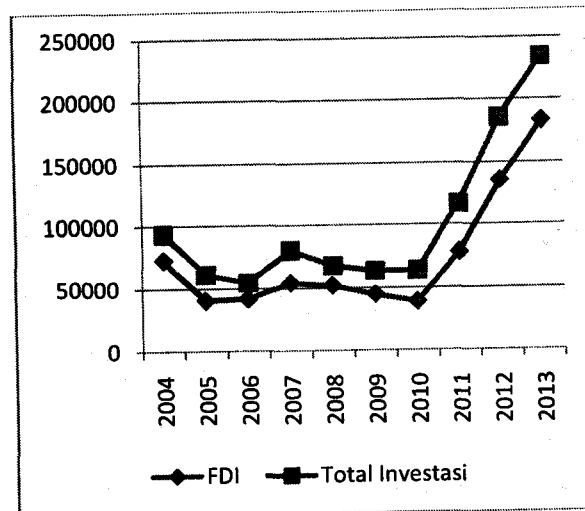
Menurut Todaro dalam Sodik dan Didi (2005), investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.<sup>29</sup> Sedemikian pentingnya FDI yang masuk sebagai investasi ke Indonesia untuk dapat menstimulus terciptanya peningkatan kapasitas produksi sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional ini pada ujungnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang relatif konstan dan positif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum total investasi yang masuk ke Indonesia memang sebagian besar berasal dari investasi asing atau FDI. Berdasarkan Gambar 5. terlihat rata-rata proporsi FDI dibandingkan dengan total investasi dari tahun 2004 sampai dengan 2011 sebesar 71,15%. Hal ini menunjukkan bahwa peran FDI cukup signifikan dalam mendorong peningkatan investasi total. Disamping itu, peningkatan FDI yang masuk ke Indonesia berdasarkan Gambar 6 dapat terlihat jelas adanya tren yang positif. Jika pada tahun 2004 total FDI yang masuk ke Indonesia sebesar Rp73.097 miliar maka pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 150,26% menjadi Rp182.938 miliar. Peningkatan realisasi FDI banyak terdapat pada industri makanan, industri kertas dan percetakan, industri kimia, dan farmasi serta industri logam, mesin, dan elektronik.

<sup>28</sup>Fabinne Fortaniner, "FDI and Host Country Economic Growth: Does the Investor's Country of Origin Play a Role?", *Transnational Corporations Journal* Vol. 16 No. 2, 2007, p. 63-68.

<sup>29</sup>Jamzani Sodik, Didi Nurdin, "Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca-Otonomi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No. 2, 2005, hlm 33-34.

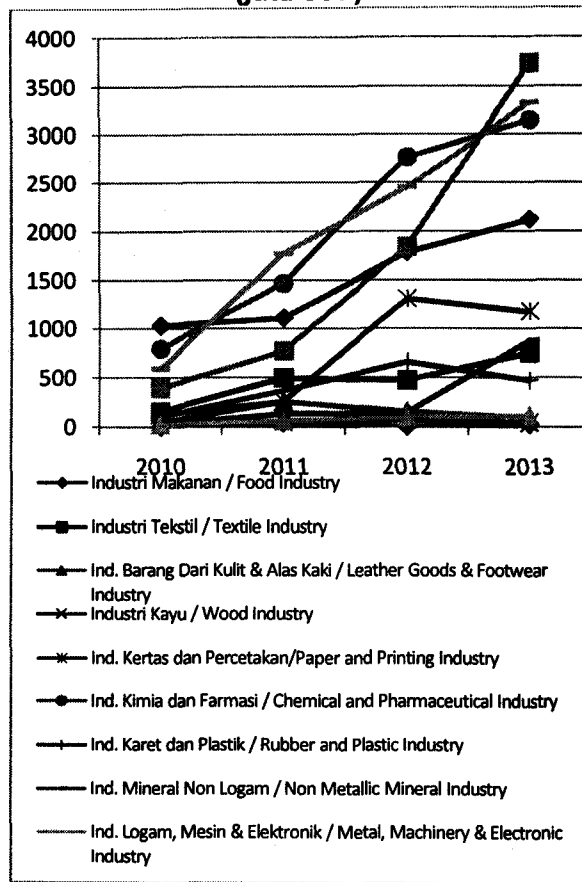
**Gambar 6. Perkembangan FDI dan Total Investasi Tahun 2004-2013 (dalam Rp Miliar)**



Sumber: BKPM (2014).

Perkembangan FDI yang masuk ke Indonesia menurut sektor dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa dari 12 sektor industri yang ada, maka industri kendaraan bermotor dan alat transportasi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2010 realisasi FDI di sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi sebesar \$393,7735 juta USD maka pada tahun 2013 meningkat 9,47 kali menjadi \$3732,2409 USD. Posisi kedua yang juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi adalah industri logam, mesin, dan elektronik. Pada tahun 2010 realisasi FDI pada sektor tersebut adalah sebesar \$589,5095 juta USD maka pada tahun 2013 meningkat sebesar 5,6 kali menjadi sebesar \$327,0882 USD. Pada posisi ketiga yang mengalami peningkatan adalah berasal dari industri kimia dan farmasi. Pada tahun 2010 realisasi FDI pada sektor tersebut adalah sebesar \$793,363 juta USD mengalami peningkatan sebesar 3,9 kali pada tahun 2013 menjadi sebesar \$3142,3133 juta USD.

**Gambar 7. Perkembangan Realisasi FDI Menurut Sektor (juta USD)**



Sumber: BKPM (2014).

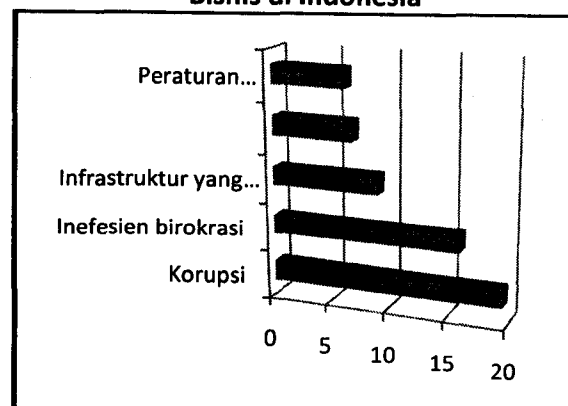
Akan tetapi terkait dengan FDI yang masuk ke Indonesia, menurut lembaga independen yang berasal dari asing terdapat beberapa permasalahan berikut. Yang pertama adalah laporan *Doing Business (DB)* yang diterbitkan oleh *International Finance Corporation (IFC)*, *World Bank* pada tahun 2014 menemukan beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dalam melakukan investasi dan bisnis di Indonesia, antara lain prosedur dan mekanisme perizinan usaha, biaya perizinan, dan regulasi yang terkait dengan usaha menjalankan bisnis yang masih menyulitkan pada pelaku usaha.<sup>30</sup> Yang kedua pendapat yang senada mengenai kendala dan hambatan dalam

<sup>30</sup>World Bank, *Doing Business in Indonesia 2014*, International Finance Corporation, World Bank Group, 2014, p. 17-20.

melakukan usaha di Indonesia yang dikemukakan oleh *World Economic Forum (WEF)* dalam laporannya berjudul *The Global Competitiveness Report 2013-2014*, yang menilai ada 5 masalah utama yang menjadi penghambat dan kendala dalam melakukan usaha dan investasi di Indonesia.<sup>31</sup>

Kendala yang menghambat tersebut antara lain dapat diinformasikan pada Gambar 8. bahwa kendala utama yang menghadang sebesar 19,3% adalah tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Kendala yang kedua sebesar 15% disebabkan oleh ketidakefisienan birokrasi pemerintahan. Kendala yang ketiga yang menghadang sebesar 9,1% disebabkan oleh infrastruktur yang kurang. Kendala keempat sebesar 6,9% disebabkan oleh aksesibilitas ke sumber keuangan yang terbatas atau kurang. Sedangkan kendala yang terakhir yang menghambat sebesar 6,3% disebabkan oleh peraturan ketenagakerjaan yang rumit dan tidak pro terhadap pengusaha. Jika berbagai kendala tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah, maka dapat berdampak kepada pihak swasta dan asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Dan berbagai hambatan tersebut bahkan akan berdampak kepada para pelaku usaha yang sudah *existing* di Indonesia dapat keluar dari Indonesia.

**Gambar 8. Kendala dan Hambatan Melakukan Bisnis di Indonesia**



Sumber: WEF (2014).

<sup>31</sup>World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2013-2014*. Insight Report World Economic Forum, 2014, p. 218-219.

Sudah saatnya pemerintah mampu menyelesaikan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghalangi masuknya dana FDI ke Indonesia untuk melakukan usaha. Artinya pemerintah harus segera bergerak cepat untuk menyelesaikan beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan usaha dan melilit pelaku usaha di Indonesia. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang ada dan menghantui usaha di Indonesia, setelah itu perlu disusun suatu rencana kerja dan target yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan yang menghadang, serta diperlukan evaluasi yang jelas terhadap program dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hal ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaku usaha, sehingga dapat menstimulus para investor dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan investasi di Indonesia.

## II. KESIMPULAN

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah fase Orde Baru yang dimulai dari awal tahun 1990 sampai dengan 1997. Pada fase ini pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dan selalu berada diatas 7%. Fase kedua adalah fase krisis dan pemulihan ekonomi. Pada fase ini, ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi menjadi -13,3%. Namun perlahan tetapi pasti pertumbuhan ekonomi kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Sementara itu fase ketiga adalah fase pada saat pemerintahan SBY, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Perekonomian Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif mulai dari tahun 2004 sebesar 5,03% sampai dengan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi yang positif 4,63%. Walaupun sempat mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan dilanda krisis

ekonomi global pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terus melanjut dan bertahan.

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memberikan pengertian kepada kita, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun yang perlu dicermati mengenai pengeluaran pemerintah adalah sudah waktunya pengeluaran pemerintah dalam APBN baik itu pengeluaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah harus diarahkan pada pengeluaran yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula dengan perubahan struktur anggaran belanja pemerintah harus dialokasikan pada belanja publik yang lebih besar daripada belanja subsidi dan belanja aparatur.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa variabel FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap terjadi peningkatan FDI yang masuk ke Indonesia maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. FDI yang masuk dapat mendorong pergerakan kehidupan ekonomi bangsa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hambatan dan kendala yang menghadang masuknya FDI ke Indonesia, antara lain korupsi, inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang kurang, aksesibilitas yang kurang, dan peraturan ketenagakerjaan yang rumit dan tidak pro terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan peran serta pemerintah dan dengan segera pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut.

